

Daftar Pustaka

Buku :

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan dan KB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013, Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2014.

Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013, Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2014.

Badan Pusat Statistik Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2014, Badan Pusat Statistik Kulon Progo, Wates, 2014.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo, 2002, Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2014.

Dapodik Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2014

Dinas Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2014.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2014.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan Kab. Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2014.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2014.

Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman. 1992. *“Analisis Data Kualitatif”*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Singarimbun Masri dan Efendi Sofyan, 1989, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta : LP3S

Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Gotong Royong Masyarakat Desa Sidorejo, Lendah, Kulon Progo Tahun Anggaran 2013.

Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Gotong Royong Masyarakat Desa Sidorejo, Lendah, Kulon Progo Tahun Anggaran 2014.

Surat Pertanggung Jawaban Bantuan Gotong Royong Masyarakat Desa Sidorejo, Lendah, Kulon Progo Tahun Anggaran 2015.

Jurnal :

AAGN Ari Dwipayana, dkk. 2003, *“Membangun Good Governance di Desa”*, Yogyakarta: IRE.

Adrianus Devaczy John P, *“Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa Di Desa SIDAHARI Kecamatan JELAI HULU Kabupaten KETAPANG”*.

- Arnstein, Sherry R. 1969, *“A Ladder of Citizen Participation”*, JAIP, Vol.35, No. 4.
- Bintoro, *“Perencanaan Pembangunan”*, Op.Cit, Hal.45 dalam Purwanti, *“Pengaruh Efisiensi Administrasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Perencanaan Pembangunan Desa”*.
- Edwards,Meredith, 2008, *“Participatory Gvernance”*, Corporate Governance ARC Project. Canberra: University of Canberra, Australia.
- Hendri, *“Pelaksanaan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar”*.
- Israwan Paulus Setyoko, Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa.
- KPK, 2015, *Buku Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*,
- Mayani,Dwirika. *“Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Pendidikan Dasar”*.
- Muhajir Darwin, 2000, *“Good Governance dan Kebijakan Publik”*, dalam Sukardi, 2007, *“Good Governance: Reposisi Administrasi Publik Lensa Kapital Sosial”*, Paper Bahan Kuliah PPS Unmer Malang Jurusan MAP.
- Pratama,Andri. *Evaluasi Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa di Kecamatan Adiwerna Tahun Anggaran 2010 sampai 2012*.
- Purwanti, *“Pengaruh Efisiensi Administrasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa”*.
- Saparin, 1979, *“Tata Pemerintahan dana Administrasi Pemerintahan Desa”*, Jakarta : Ghalia Indonesia, dalam Purwanti, *Pengaruh Efisiensi Administrasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Perencanaan Pembangunan Desa*.
- Sondang, 1981, *“Administrasi Pembangunan”*, Jakarta : Gunung Agung, dalam Purwanti, *“Pengaruh Efisiensi Administrasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Perencanaan Pembangunan Desa”*.
- Surya,Ketrin.*Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan.2013*.
- Taufik.Taufeni, *“Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia”*.
- Tjokroamidjojo Bintoro dalam Ibnu Syamsi, 1986, *“Ensiklopedia Umum dan Pembangunan”*, Yogyakarta : Fak. I Sosial dan I Politik UGM.
- World Bank, dalam Sadu Wasistiono, 2007, *“Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance”*, Jakarta, Lipi Perss.
- Wright and Fung, *“Deepening Democracy : Innovation in Empowered Participatory Governance”*.

Undang-Undang :

Lampiran Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Lokasi dan Alokasi Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintahan Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa, Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek dan Dana Alokasi Desa Tahun 2012.

Lampiran Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Lokasi dan Alokasi Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintahan Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa, Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek dan Dana Alokasi Desa Tahun 2013.

Lampiran Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Lokasi dan Alokasi Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa, Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintahan Desa Karangkopek, Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa, Jaminan Hari Tua Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek dan Dana Alokasi Desa Tahun 2014.

Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam skripsi Kartika Putri, Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 studi Di Pemerintah Kabupaten Jombang.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyaluran Dana Alokasi Desa.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa.

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Desa Sidorejo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo (RPJM-Desa) Tahun 2013-2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wawancara :

Adika G.S, S.IP (Staf Pemerintahan Kecamatan Lendah)

Bapak Suharjo (Sekretaris Desa Sidorejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo)

Bapak Muh.Hidayat (Bendahara Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo)

Bapak Sutaryono (KASI Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo)

Internet :

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Kondisi-Umum_6_hal diakses pada tanggal 6 Februari 2016 pukul 10.44 WIB

http://www.kulonprogokab.go.id/v21/sosial-pendidikan-kesehatan-budaya_13_hal diakses pada tanggal 6 Februari 2016 pukul 11.00 WIB